

Tinjauan Mata Kuliah

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan lembaga atau pejabat pemerintahan yang bertujuan mengatur kehidupan publik baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara memilih suatu cara bertindak maupun dengan cara tidak memilih tindakan apapun (*no action policy*) untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Perbincangan tentang kebijakan publik tidak terlepas dari pandangan dan paham tentang peran pemerintah itu sendiri.

Mata kuliah ini memiliki tiga muatan: **Pertama**, konsep yang mendasari kebijakan publik yang mencakup visi, misi, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya dalam Renstra Kemdiknas 2010-2015. **Kedua**, prinsip dasar dalam proses penyusunan kebijakan nasional pendidikan hingga menjadi peraturan perundang-undangan yang mencakup inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Secara formal proses penyusunan dituangkan dalam kegiatan penyusunan naskah akademik dan draft RUU/RPP, studi banding, sosialisasi, uji publik, penetapan. **Ketiga**, pemahaman tentang strategi implementasi, evaluasi, dan revisi atau penggantian undang-undang. Dalam modul ini akan diperkenalkan penerapan konsep analisis biaya-manfaat dan prinsip efisiensi (*Pareto efficiency*) sebagai pendekatan dalam seleksi dan evaluasi efektivitas kebijakan pendidikan.

Setelah mempelajari mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep yang mendasari kebijakan publik, prinsip dasar dalam proses penyusunan kebijakan nasional pendidikan, serta memahami tentang strategi implementasi, evaluasi, dan revisi atau penggantian undang-undang. Secara khusus, setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Rasional kebijakan publik
2. Kegagalan mekanisme pasar
3. Mengatasi kegagalan kebijakan pemerintah
4. Proses penyusunan kebijakan publik
5. Meta analisis
6. Cost Benefit Analisis

7. Pareto efisiensi (kriteria kesejahteraan)
8. Pendidikan sebagai investasi
9. Pendidikan sebagai konsumsi
10. Pemerataan akses
11. Mutu dan relevansi
12. Akuntabilitas publik
13. NA, RUU/RPP, studi banding, harmonisasi, uji publik)
14. Renstra Kemendiknas
15. Otonomi pendidikan (SBM dan Otonomi PT)
16. Penganggaran Berbasis Kinerja
17. Ujian Nasional
18. Under investment
19. Pengangguran terdidik
20. Putus sekolah
21. Sebaran guru tidak merata
22. Praktek penyusunan RUU/RPP pendidikan
23. Seminar hasil penelitian *best practices* kebijakan pendidikan nasional

Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai, maka materi mata kuliah ini disusun ke dalam 9 modul dengan pembagian sebagai berikut:

- Modul 1: Konsep dasar kebijakan publik
- Modul 2: Proses penyusunan kebijakan publik
- Modul 3: Pendekatan dalam penyusunan kebijakan publik
- Modul 4: Konsep dasar kebijakan pendidikan
- Modul 5: Prinsip dasar kebijakan pendidikan nasional
- Modul 6: Proses penyusunan kebijakan pendidikan
- Modul 7: Evaluasi efektivitas kebijakan nasional
- Modul 8: Indikator kebijakan pendidikan yang tidak efektif
- Modul 9: Penerapan konsep, prinsip kebijakan publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional

Peta Kompetensi MIPK5302 Analisis Kebijakan Pendidikan / 3 sks

